

Antara Toleransi Dan Sinkretisme: Telaah Kritis Terhadap Pluralisme Dalam Kehidupan Sosial Dan Keagamaan Pada Masyarakat Indonesia Yang Majemuk

Thio Donald Sugiarto

Sekolah Tinggi Teologi Injili Indonesia Surabaya

Email: thiodonaldsugiarto@sttii-surabaya.ac.id

Abstrak

Pluralism is one of the most widely discussed concepts in contemporary social and religious studies. However, debates surrounding pluralism are often marked by conceptual ambiguity because social pluralism and religious pluralism are frequently treated as identical concepts. This situation gives rise to two equally problematic tendencies: syncretism, which obscures religious identity, and intolerance, which fosters hostility toward differences. Therefore, examining the boundaries of pluralism is essential within pluralistic societies that seek to preserve social harmony without compromising the integrity of religious convictions. This article is based on the thesis that social pluralism constitutes an important foundation for communal life, whereas religious pluralism, when developed into theological relativism, has the potential to blur religious identity and encourage syncretism. This study employs a qualitative approach using library research. Data were gathered from literature in the fields of sociology of religion, philosophy of religion, theology of religions, human rights, and religious freedom, and were analyzed through descriptive and critical approaches. The findings indicate that social pluralism contributes positively to democratic life, respect for human dignity, and cooperation across social identities. In contrast, religious pluralism faces conceptual difficulties when fundamental differences among religions are reduced to expressions that are assumed to be equally valid responses to the same reality. At the same time, the preservation of religious identity must not develop into intolerance. This article proposes a new concept, namely *coexistence without relativism*, as a model that rejects two opposing extremes: syncretism, which erases identity, and intolerance, which is hostile toward difference. This model enables respect for diversity while simultaneously preserving the integrity of each religious community's beliefs.

Kata kunci: social pluralism, religious pluralism, tolerance, syncretism, religious identity, religious freedom.

Abstract

Pluralisme merupakan salah satu konsep yang banyak digunakan dalam pembahasan sosial dan keagamaan kontemporer. Namun, perdebatan mengenai pluralisme sering kali diwarnai oleh ketidakjelasan konseptual karena pluralisme sosial dan pluralisme agama diperlakukan sebagai konsep yang identik. Kondisi ini memunculkan dua kecenderungan yang sama-sama problematis, yaitu sinkretisme yang mengaburkan identitas keagamaan dan intoleransi yang memusuhi perbedaan. Oleh karena itu, kajian mengenai batas-batas pluralisme menjadi penting untuk dilakukan dalam konteks masyarakat majemuk yang terus berupaya menjaga harmoni sosial tanpa mengorbankan integritas keyakinan keagamaan. Artikel ini berangkat dari tesis bahwa pluralisme sosial merupakan fondasi yang penting bagi kehidupan bersama, tetapi pluralisme agama yang berkembang menuju relativisme teologis berpotensi mengaburkan identitas agama dan mendorong sinkretisme. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (*library research*). Data diperoleh dari berbagai literatur dalam bidang sosiologi agama, filsafat agama, teologi agama-agama, hak asasi manusia, dan kebebasan beragama, kemudian dianalisis melalui pendekatan deskriptif dan kritis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pluralisme sosial berkontribusi positif terhadap kehidupan demokratis, penghormatan terhadap martabat manusia, dan kerja sama lintas identitas. Sebaliknya, pluralisme agama menghadapi persoalan konseptual ketika perbedaan-perbedaan mendasar antaragama direduksi menjadi ekspresi yang dianggap setara dari realitas yang sama. Di sisi lain, pemeliharaan identitas keagamaan juga tidak boleh berkembang menjadi intoleransi. Artikel ini mengajukan sebuah konsep baru yaitu *coexistence without relativism* sebagai model yang menolak dua ekstrem sekaligus, yaitu sinkretisme yang menghapus identitas dan intoleransi yang memusuhi perbedaan. Model ini memungkinkan penghormatan terhadap keberagaman sekaligus pemeliharaan integritas keyakinan masing-masing komunitas agama.

Keywords: pluralisme sosial, pluralisme agama, toleransi, sinkretisme, identitas keagamaan, kebebasan beragama.

Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat keberagaman yang sangat tinggi di dunia. Keberagaman tersebut tidak hanya tampak dalam aspek etnis, bahasa, budaya, dan adat istiadat, tetapi juga dalam aspek agama dan kepercayaan. Berdasarkan realitas tersebut, kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari perjumpaan yang terus-menerus antara individu dan kelompok yang memiliki latar belakang identitas yang berbeda. Dalam konteks demikian, kemampuan untuk hidup berdampingan secara damai menjadi kebutuhan yang mendasar bagi keberlangsungan masyarakat. Tidak mengherankan apabila konsep pluralisme sering kali memperoleh perhatian yang besar dalam diskursus sosial, politik, maupun keagamaan karena dianggap sebagai salah satu landasan penting bagi terpeliharanya harmoni dalam masyarakat yang majemuk.¹

Pada tataran sosial, pluralisme umumnya dipahami sebagai sikap pengakuan dan penghormatan terhadap keberadaan kelompok-kelompok yang berbeda dalam ruang publik yang sama. Pluralisme dalam pengertian ini tidak menuntut keseragaman identitas, melainkan mendorong terciptanya relasi yang saling menghargai di tengah perbedaan yang ada. Kehidupan sosial yang sehat justru dibangun melalui kesediaan

¹Peter L. Berger, *The Many Altars of Modernity: Toward a Paradigm for Religion in a Pluralist Age* (Berlin: De Gruyter, 2014).

berbagai kelompok untuk bekerja sama, berdialog, dan berkontribusi bagi kebaikan bersama tanpa harus melepaskan identitas khas masing-masing. Oleh sebab itu, pluralisme sosial sering dipandang sebagai salah satu prasyarat penting bagi terciptanya masyarakat demokratis yang menghargai kebebasan, kesetaraan, dan martabat manusia.²

Dalam konteks Indonesia, nilai-nilai tersebut memiliki hubungan yang erat dengan semangat kebangsaan yang tercermin dalam Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Sejak awal berdirinya negara ini, para pendiri bangsa menyadari bahwa Indonesia tidak dibangun di atas keseragaman identitas, melainkan di atas kesediaan berbagai kelompok untuk hidup bersama dalam satu ikatan kebangsaan. Karena itu, keberagaman tidak dipandang sebagai ancaman yang harus dihilangkan, melainkan sebagai realitas yang harus dikelola secara bijaksana. Dalam pengertian ini, pluralisme sosial dapat dipahami sebagai upaya untuk mengembangkan kehidupan bersama yang harmonis tanpa menghapus perbedaan-perbedaan yang memang menjadi bagian dari identitas masyarakat Indonesia.

Meskipun demikian, perkembangan diskursus pluralisme pada masa modern menunjukkan bahwa istilah pluralisme tidak selalu digunakan dalam pengertian sosial semata. Dalam berbagai kajian filsafat agama dan teologi agama-agama, pluralisme sering kali dipakai untuk menunjuk suatu pandangan yang lebih jauh, yaitu keyakinan bahwa agama-agama yang berbeda pada dasarnya merupakan jalan-jalan yang sama-sama sah menuju realitas ilahi atau keselamatan yang sama. Pemahaman ini berkembang secara signifikan terutama melalui karya-karya tokoh seperti John Hick yang berusaha menjelaskan keberagaman agama dunia melalui konsep *the Real*, yaitu suatu realitas transenden yang diyakini menjadi sumber dari berbagai pengalaman keagamaan manusia.³

Pandangan tersebut memperoleh sambutan positif dari sebagian kalangan karena dinilai mampu menyediakan landasan filosofis bagi dialog antaragama dan kehidupan yang lebih damai dalam masyarakat plural. Beberapa pemikir seperti Paul F. Knitter dan Diana L. Eck bahkan mengembangkan pendekatan yang menekankan pentingnya keterbukaan terhadap tradisi keagamaan lain sebagai bagian dari upaya membangun relasi yang konstruktif di tengah dunia yang semakin terhubung.⁴

Di sisi lain, tidak sedikit sarjana yang memandang bahwa pluralisme agama menimbulkan sejumlah persoalan konseptual dan teologis yang perlu dikaji secara kritis. Beberapa pemikir seperti Harold Netland, Lesslie Newbigin, dan Gavin D'Costa berpendapat bahwa pluralisme agama sering kali berujung pada relativisasi terhadap klaim-klaim kebenaran yang justru menjadi inti identitas masing-masing agama.⁵ Menurut mereka, keberagaman agama tidak dapat begitu saja direduksi menjadi ekspresi-ekspresi yang berbeda dari satu realitas yang sama karena setiap tradisi keagamaan memiliki pandangan yang unik mengenai hakikat Tuhan, keselamatan, manusia, dan tujuan hidup. Ketika perbedaan-perbedaan tersebut diabaikan atau

²Diana L. Eck, *A New Religious America: How a "Christian Country" Has Become the World's Most Religiously Diverse Nation* (San Francisco: HarperSanFrancisco, 2002).

³John Hick, *An Interpretation of Religion: Human Responses to the Transcendent*, 2nd ed. (New Haven: Yale University Press, 2004).

⁴Paul F. Knitter, *Introducing Theologies of Religions* (Maryknoll, NY: Orbis Books, 2002); Eck, *A New Religious America*.

⁵Harold A. Netland, *Encountering Religious Pluralism: The Challenge to Christian Faith and Mission* (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 2001); Lesslie Newbigin, *The Gospel in a Pluralist Society* (Grand Rapids: William B. Eerdmans Publishing, 1989); Gavin D'Costa, *Christianity and World Religions: Disputed Questions in the Theology of Religions* (Chichester: Wiley-Blackwell, 2009).

dianggap tidak penting, muncul risiko bahwa identitas keagamaan akan mengalami pengaburan.

Persoalan ini menjadi semakin relevan ketika pluralisme agama dipahami bukan lagi sebagai penghormatan terhadap keberadaan agama-agama yang berbeda, melainkan sebagai tuntutan untuk mengurangi atau bahkan menanggalkan klaim-klaim khas yang dimiliki masing-masing tradisi. Dalam situasi demikian, dialog antaragama berpotensi bergeser dari upaya saling memahami menuju upaya menyeragamkan keyakinan. Jika proses ini berlangsung secara terus-menerus, maka batas antara dialog dan sinkretisme menjadi semakin kabur. Sinkretisme pada dasarnya mengacu pada proses pencampuran unsur-unsur kepercayaan yang berbeda sehingga menghasilkan bentuk keyakinan baru yang tidak lagi sepenuhnya identik dengan tradisi-tradisi asalnya. Walaupun sering dipandang sebagai jalan menuju persatuan, sinkretisme juga dapat menimbulkan persoalan karena berpotensi menghilangkan keunikan dan integritas ajaran yang dimiliki oleh masing-masing agama.⁶

Dalam konteks tersebut, muncul pertanyaan yang penting untuk diajukan: apakah penghormatan terhadap keberagaman menuntut seseorang untuk menganggap semua agama sama? Apakah toleransi hanya dapat diwujudkan melalui penghapusan perbedaan-perbedaan teologis? Ataukah justru penghormatan yang sejati terhadap kebebasan beragama mensyaratkan pengakuan terhadap hak setiap komunitas untuk mempertahankan identitas dan keyakinan khasnya? Pertanyaan-pertanyaan ini menunjukkan bahwa relasi antara pluralisme, toleransi, identitas agama, dan kebebasan beragama merupakan persoalan yang jauh lebih kompleks daripada sekadar ajakan untuk hidup rukun.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas pluralisme dari berbagai perspektif, baik sosiologis, filosofis, maupun teologis. Sebagian besar penelitian tersebut menyoroti kontribusi pluralisme bagi pembangunan masyarakat yang inklusif dan damai. Namun demikian, masih terdapat ruang yang cukup luas untuk mengkaji secara lebih mendalam tentang batas-batas pluralisme agama, khususnya dalam kaitannya dengan potensi munculnya sinkretisme dan implikasinya terhadap pemeliharaan identitas keagamaan. Dalam konteks Indonesia, pembahasan semacam ini menjadi penting karena masyarakat Indonesia tidak hanya membutuhkan toleransi sosial yang kuat, tetapi juga penghormatan terhadap kebebasan setiap kelompok agama untuk mempertahankan keyakinan dan tradisi yang menjadi ciri khasnya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan konseptual antara pluralisme sosial dan pluralisme agama, mengevaluasi relasi antara toleransi dan sinkretisme, serta merumuskan suatu model koeksistensi yang memungkinkan penghormatan terhadap keberagaman tanpa menghilangkan identitas keagamaan masing-masing. Artikel ini berargumen bahwa pluralisme sosial merupakan fondasi yang penting bagi kehidupan masyarakat majemuk, tetapi pluralisme agama yang bergerak menuju relativisasi kebenaran berpotensi mengaburkan identitas keagamaan dan mendorong terjadinya sinkretisme. Oleh karena itu, penghormatan terhadap keberagaman seharusnya diwujudkan melalui koeksistensi yang menghargai perbedaan sekaligus mempertahankan integritas keyakinan masing-masing, bukan melalui peleburan identitas yang justru menghilangkan kekhasan agama-agama yang ada.

⁶Hendrik Kraemer, *The Christian Message in a Non-Christian World* (London: Edinburgh House Press, 1938).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (*library research*). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berupaya memahami, menganalisis, dan mengevaluasi konsep-konsep yang berkembang dalam diskursus pluralisme sosial, pluralisme agama, toleransi, sinkretisme, dan kebebasan beragama. Menurut Creswell dan Poth, penelitian kualitatif bertujuan untuk mengeksplorasi serta memahami makna yang diberikan individu atau kelompok terhadap suatu fenomena sosial maupun kemanusiaan.⁷ Dalam konteks penelitian ini, fenomena yang ditelaah bukan berupa perilaku sosial yang diamati secara langsung, melainkan gagasan-gagasan konseptual yang berkembang dalam literatur akademik mengenai pluralisme dan kehidupan keagamaan.

Metode studi pustaka digunakan karena objek penelitian berupa pemikiran, teori, dan argumentasi yang terdapat dalam berbagai sumber tertulis. Studi pustaka memungkinkan peneliti melakukan penelusuran, pengkajian, dan evaluasi kritis terhadap berbagai literatur yang relevan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai suatu persoalan. Zed menjelaskan bahwa penelitian kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengolah bahan penelitian tanpa harus terjun langsung ke lapangan.⁸ Dengan demikian, metode ini dinilai sesuai untuk mengkaji perdebatan konseptual mengenai pluralisme yang banyak berkembang dalam karya-karya filsafat agama, teologi agama-agama, sosiologi agama, dan studi kebebasan beragama.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer mencakup karya-karya para pemikir yang secara langsung membahas pluralisme sosial maupun pluralisme agama. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan karya para pemikir Indonesia yang memberikan kontribusi penting dalam diskursus keberagaman dan kehidupan beragama di Indonesia. Adapun sumber sekunder diperoleh dari artikel jurnal ilmiah, buku-buku pendukung, dokumen hukum nasional, serta instrumen internasional yang berkaitan dengan kebebasan beragama dan hak asasi manusia.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui identifikasi, seleksi, dan kajian terhadap literatur yang memiliki relevansi dengan fokus penelitian. Literatur yang dipilih merupakan karya-karya akademik yang memiliki kredibilitas ilmiah dan telah memberikan kontribusi signifikan dalam kajian pluralisme, toleransi, sinkretisme, dan hubungan antaragama. Menurut Sugiyono, studi dokumen merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang penting dalam penelitian kualitatif karena memungkinkan peneliti memperoleh informasi yang kaya melalui berbagai sumber tertulis yang telah tersedia.⁹

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan tiga tahapan. Tahap pertama adalah analisis deskriptif yang bertujuan memaparkan konsep-konsep utama mengenai pluralisme sosial, pluralisme agama, toleransi, sinkretisme, dan kebebasan beragama sebagaimana dikemukakan oleh para pemikir yang menjadi objek kajian. Tahap kedua adalah analisis komparatif, yaitu membandingkan berbagai pandangan yang berkembang dalam literatur untuk menemukan persamaan, perbedaan, serta implikasi konseptual dari masing-masing pendekatan. Tahap ketiga adalah analisis kritis yang digunakan untuk mengevaluasi konsistensi logis dan relevansi argumentasi para pemikir tersebut

⁷John W. Creswell and Cheryl N. Poth, *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing among Five Approaches*, 4th ed. (Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2017).

⁸Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, 3rd ed. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2014).

⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 2nd ed. (Bandung: Alfabeta, 2019).

dalam menjelaskan hubungan antara pluralisme, toleransi, identitas keagamaan, dan sinkretisme.

Melalui tahapan analisis tersebut, penelitian ini berupaya menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai batas-batas pluralisme dalam kehidupan sosial dan keagamaan. Penelitian ini tidak diarahkan untuk menentukan validitas teologis suatu agama tertentu, melainkan untuk mengkaji bagaimana pluralisme dapat berfungsi sebagai sarana membangun kehidupan bersama yang harmonis tanpa harus menghilangkan identitas dan kekhasan yang dimiliki oleh masing-masing tradisi keagamaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pluralisme merupakan salah satu konsep yang paling banyak dibahas dalam wacana sosial, politik, dan keagamaan kontemporer. Meskipun demikian, penggunaan istilah pluralisme tidak selalu mengacu pada pengertian yang sama. Dalam berbagai literatur, pluralisme dapat dipahami sebagai sikap sosial yang mendorong kehidupan bersama di tengah keberagaman, tetapi juga dapat dipahami sebagai suatu pendekatan teologis yang berupaya menjelaskan hubungan antara agama-agama yang berbeda. Perbedaan penggunaan istilah ini sering kali menimbulkan kerancuan konseptual sehingga berbagai perdebatan mengenai pluralisme kerap berlangsung tanpa kejelasan mengenai objek yang sebenarnya sedang dibicarakan.

Pluralisme sebagai Realitas Sosial dan Dasar Kehidupan Bersama

Pluralisme pada dasarnya berangkat dari pengakuan terhadap realitas keberagaman yang melekat dalam kehidupan manusia. Sejak masa-masa awal peradaban hingga era globalisasi kontemporer, masyarakat tidak pernah hidup dalam keadaan yang sepenuhnya homogen. Perbedaan etnis, bahasa, budaya, tradisi, sistem nilai, dan keyakinan keagamaan merupakan fakta yang terus menyertai perjalanan sejarah umat manusia. Dalam konteks modern, mobilitas penduduk, perkembangan teknologi informasi, dan meningkatnya interaksi lintas batas semakin memperkuat perjumpaan antara kelompok-kelompok yang berbeda. Akibatnya, keberagaman bukan lagi sekadar fenomena lokal, melainkan menjadi realitas sosial yang hadir dalam hampir setiap ruang kehidupan manusia.¹⁰

Dalam kajian sosiologi agama, keberagaman tersebut sering disebut sebagai pluralitas (*plurality*), yaitu keadaan objektif yang menunjukkan adanya banyak identitas, pandangan hidup, dan sistem keyakinan yang hidup berdampingan dalam suatu masyarakat. Akan tetapi, pluralitas sebagai fakta sosial tidak secara otomatis menghasilkan hubungan yang harmonis. Sejarah menunjukkan bahwa keberagaman dapat menjadi sumber kekayaan sosial, tetapi juga dapat menjadi sumber konflik apabila tidak dikelola secara bijaksana. Oleh karena itu, para ilmuwan sosial membedakan antara pluralitas sebagai kondisi faktual dan pluralisme sebagai respons normatif terhadap kondisi tersebut. Dengan kata lain, pluralitas menggambarkan kenyataan adanya perbedaan, sedangkan pluralisme merupakan sikap atau pendekatan yang mengakui, menerima, dan mengelola perbedaan tersebut dalam kehidupan bersama.¹¹

Pemahaman ini penting karena dalam percakapan sehari-hari kedua istilah tersebut sering kali digunakan secara bergantian. Padahal, seseorang dapat hidup dalam masyarakat yang plural tanpa memiliki sikap pluralis. Sebaliknya, pluralisme

¹⁰Berger, *The Many Altars of Modernity*.

¹¹Eck, *A New Religious America*.

mengandaikan adanya kesediaan untuk mengakui keberadaan pihak lain sebagai sesama anggota masyarakat yang memiliki hak dan martabat yang setara. Dalam pengertian ini, pluralisme bukan sekadar toleransi pasif yang membiarkan pihak lain hidup tanpa gangguan, melainkan suatu keterlibatan aktif untuk membangun kehidupan bersama di tengah perbedaan.¹²

Salah satu pemikir yang memberikan kontribusi penting dalam memahami pluralisme sosial adalah Peter L. Berger. Berger menjelaskan bahwa masyarakat modern ditandai oleh hadirnya berbagai “altar” atau pusat makna yang hidup berdampingan dalam ruang sosial yang sama. Menurutnya, modernitas telah menciptakan kondisi di mana individu terus-menerus berhadapan dengan berbagai pilihan pandangan hidup yang berbeda dari keyakinannya sendiri. Situasi ini tidak serta-merta menghasilkan relativisme, tetapi menuntut kemampuan untuk hidup dalam masyarakat yang dipenuhi oleh perbedaan.¹³ Dengan demikian, pluralisme sosial muncul bukan sebagai ancaman terhadap identitas, melainkan sebagai mekanisme yang memungkinkan masyarakat tetap bertahan dalam kondisi keberagaman yang semakin kompleks.

Pandangan Berger memiliki relevansi yang besar bagi masyarakat Indonesia. Sebagai negara yang terdiri atas ratusan kelompok etnis, bahasa daerah, dan tradisi budaya, Indonesia sejak awal dibangun di atas kesadaran akan keberagaman. Para pendiri bangsa menyadari bahwa persatuan nasional tidak mungkin dicapai melalui penyeragaman identitas, melainkan melalui komitmen bersama untuk hidup dalam perbedaan. Semangat tersebut tercermin dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang menegaskan bahwa keberagaman dan persatuan bukanlah dua hal yang saling bertentangan, melainkan dua realitas yang harus dipelihara secara bersamaan.

Dalam konteks Indonesia, gagasan pluralisme sosial juga memperoleh dukungan dari berbagai pemikir nasional. Nurcholish Madjid menegaskan bahwa kemajemukan merupakan bagian dari kenyataan kehidupan yang tidak dapat dihindari. Menurutnya, keberagaman bukanlah penyimpangan dari kehendak Tuhan, melainkan bagian dari desain kehidupan manusia yang harus diterima dengan sikap terbuka dan dewasa. Oleh karena itu, kehidupan bersama dalam masyarakat majemuk memerlukan penghormatan terhadap hak setiap individu dan kelompok untuk menjalankan keyakinannya tanpa paksaan maupun diskriminasi.¹⁴

Pandangan serupa juga terlihat dalam pemikiran Abdurrahman Wahid yang menempatkan penghormatan terhadap martabat manusia sebagai fondasi kehidupan bersama. Bagi Wahid, keberagaman bukanlah ancaman bagi identitas keagamaan, melainkan kesempatan untuk mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan yang universal. Karena itu, hubungan antarumat beragama seharusnya dibangun di atas prinsip saling menghormati dan kesediaan untuk bekerja sama dalam berbagai bidang kehidupan sosial tanpa harus menghilangkan perbedaan keyakinan yang ada.¹⁵

Pemikiran tersebut sejalan dengan pandangan Franz Magnis-Suseno yang menekankan pentingnya etika publik dalam masyarakat plural. Menurut Magnis-Suseno, masyarakat demokratis hanya dapat bertahan apabila setiap kelompok bersedia menghormati hak kelompok lain untuk hidup sesuai dengan keyakinannya. Sikap ini tidak menuntut persetujuan terhadap seluruh pandangan yang berbeda, melainkan

¹²Ibid.

¹³Berger, *The Many Altars of Modernity*.

¹⁴Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemodernan* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2019).

¹⁵Abdurrahman Wahid, *Islam Kosmopolitan: Nilai-nilai Indonesia dan Transformasi Kebudayaan* (Jakarta: The Wahid Institute, 2007).

penghormatan terhadap kebebasan orang lain sebagai sesama warga negara yang memiliki hak yang sama di hadapan hukum dan masyarakat.¹⁶

Dari perspektif sosiologi agama, pluralisme sosial juga memiliki fungsi penting dalam menjaga stabilitas masyarakat. Thomas Luckmann berpendapat bahwa masyarakat modern tidak lagi ditandai oleh dominasi tunggal suatu sistem makna, melainkan oleh keberadaan berbagai sumber makna yang hidup berdampingan. Dalam situasi tersebut, kemampuan untuk mengelola keberagaman menjadi salah satu syarat utama bagi terciptanya kohesi sosial. Tanpa mekanisme yang memungkinkan kelompok-kelompok berbeda untuk hidup bersama, masyarakat akan rentan terhadap fragmentasi dan konflik sosial.¹⁷

Lebih jauh lagi, pluralisme sosial tidak hanya berkaitan dengan upaya menghindari konflik, tetapi juga berkaitan dengan pengembangan kehidupan demokratis yang sehat. Kehadiran kelompok-kelompok yang berbeda memungkinkan terjadinya pertukaran gagasan, kritik, dan kerja sama yang memperkaya kehidupan publik. Dalam masyarakat yang plural, tidak ada satu kelompok pun yang dapat memonopoli ruang sosial secara mutlak. Sebaliknya, setiap kelompok ditantang untuk berpartisipasi dalam kehidupan bersama dengan tetap menghormati keberadaan pihak lain. Dengan demikian, pluralisme sosial berkontribusi terhadap tumbuhnya budaya dialog, penghargaan terhadap hak asasi manusia, dan penguatan masyarakat sipil.¹⁸

Pada titik ini penting untuk ditegaskan bahwa pluralisme sosial tidak identik dengan relativisme. Pengakuan terhadap hak pihak lain untuk memegang keyakinan yang berbeda tidak berarti bahwa semua pandangan harus dianggap sama atau bahwa setiap klaim kebenaran kehilangan maknanya. Pluralisme sosial beroperasi terutama dalam ranah kehidupan bersama sebagai warga masyarakat, bukan dalam ranah evaluasi teologis terhadap kebenaran suatu keyakinan. Oleh sebab itu, seseorang dapat tetap meyakini kebenaran agamanya secara penuh sekaligus menghormati hak orang lain untuk memegang keyakinan yang berbeda. Distingui ini menjadi penting karena sering kali kritik terhadap pluralisme muncul akibat kegagalan membedakan antara pluralisme sosial dan pluralisme agama.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pluralisme sosial merupakan respons yang konstruktif terhadap realitas keberagaman yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan manusia. Pluralisme sosial tidak bertujuan menghapus perbedaan, melainkan menciptakan ruang bagi berbagai identitas untuk hidup berdampingan secara damai dan produktif. Dalam konteks masyarakat modern, khususnya Indonesia, pluralisme sosial merupakan salah satu fondasi penting bagi terpeliharanya persatuan, keadilan, dan kehidupan demokratis.

Pergeseran Makna dari Pluralitas Menuju Pluralisme Agama

Keberagaman agama merupakan salah satu fenomena paling menonjol dalam sejarah umat manusia. Hampir setiap peradaban besar melahirkan sistem keyakinan, praktik ibadah, dan pandangan hidup yang berbeda satu dengan yang lain. Dalam masyarakat tradisional, keberadaan agama-agama yang berbeda sering kali dipahami sebagai sesuatu yang terpisah secara geografis maupun kultural. Namun, perkembangan modernitas, kolonialisme, migrasi global, pendidikan, dan kemajuan teknologi

¹⁶Franz Magnis-Suseno, *Menalar Tuhan* (Yogyakarta: Kanisius, 2006).

¹⁷Thomas Luckmann, *The Invisible Religion: The Problem of Religion in Modern Society* (New York: Macmillan, 1967).

¹⁸Miroslav Volf, *A Public Faith: How Followers of Christ Should Serve the Common Good* (Grand Rapids: Brazos Press, 2011).

komunikasi menyebabkan berbagai tradisi keagamaan yang sebelumnya hidup relatif terisolasi kini berjumpa secara intensif dalam ruang sosial yang sama. Situasi ini memunculkan pertanyaan baru mengenai bagaimana agama-agama yang berbeda harus dipahami dalam hubungannya satu dengan yang lain.

Pada tahap awal, keberagaman agama umumnya dipahami sebagai sebuah fakta sosial. Kehadiran berbagai agama tidak secara otomatis menimbulkan tuntutan untuk memberikan penilaian teologis terhadap agama-agama tersebut. Akan tetapi, meningkatnya interaksi antarumat beragama pada abad ke-20 melahirkan kebutuhan untuk merumuskan suatu pendekatan yang dapat menjelaskan hubungan antara berbagai tradisi keagamaan dalam dunia yang semakin terhubung. Menurut Race, perkembangan ini menjadi salah satu faktor yang mendorong lahirnya berbagai model teologi agama-agama modern, termasuk eksklusivisme, inklusivisme, dan pluralisme. Ketiga model tersebut berusaha menjawab pertanyaan yang sama, yaitu bagaimana memahami keberadaan agama-agama lain di luar tradisi keagamaan seseorang.¹⁹

Dalam perkembangannya, istilah pluralisme mulai mengalami perluasan makna. Jika sebelumnya pluralisme terutama dipahami sebagai pengakuan terhadap keberagaman dalam masyarakat, maka dalam ranah teologi agama-agama istilah tersebut mulai digunakan untuk menjelaskan hubungan antara kebenaran-kebenaran yang diklaim oleh berbagai agama. Pergeseran ini menunjukkan bahwa pluralisme tidak lagi sekadar berbicara mengenai kehidupan bersama dalam masyarakat yang majemuk, tetapi juga memasuki wilayah filosofis dan teologis yang menyentuh persoalan hakikat realitas, keselamatan, dan kebenaran agama.

Menurut Jacques Dupuis, perkembangan pluralisme agama tidak dapat dilepaskan dari meningkatnya kesadaran bahwa agama-agama besar dunia telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kehidupan spiritual miliaran manusia sepanjang sejarah.²⁰ Kesadaran tersebut mendorong banyak teolog untuk mempertanyakan pendekatan-pendekatan yang melihat keselamatan hanya mungkin ditemukan dalam satu tradisi tertentu. Bagi sebagian pemikir, fakta bahwa individu-individu dari berbagai agama menunjukkan kehidupan moral, spiritual, dan religius yang mendalam dianggap sebagai petunjuk bahwa karya ilahi tidak terbatas pada satu komunitas keagamaan saja.

Pandangan yang serupa muncul dalam karya Wilfred Cantwell Smith yang menolak kecenderungan untuk memahami agama sebagai sistem yang tertutup dan statis. Smith berpendapat bahwa pengalaman iman manusia jauh lebih luas daripada formulasi-formulasi institusional yang berkembang dalam sejarah agama.²¹ Menurutnya, fokus utama seharusnya diarahkan kepada iman (*faith*) yang hidup dalam diri manusia, bukan semata-mata kepada sistem agama sebagai institusi. Pendekatan ini membuka ruang yang lebih besar untuk melihat kemungkinan adanya nilai-nilai spiritual yang otentik dalam berbagai tradisi keagamaan.

Selain itu, perkembangan pluralisme agama juga dipengaruhi oleh pendekatan fenomenologi agama. Ninian Smart menegaskan bahwa agama-agama dunia memiliki berbagai dimensi yang kompleks, termasuk dimensi doktrinal, ritual, etis, pengalaman religius, sosial, dan material.²² Melalui pendekatan fenomenologis, agama-agama dipelajari berdasarkan karakteristik internalnya tanpa segera memberikan penilaian

¹⁹Alan Race, *Christians and Religious Pluralism: Patterns in the Christian Theology of Religions* (London: SCM Press, 1983).

²⁰Jacques Dupuis, *Toward a Christian Theology of Religious Pluralism* (Maryknoll, NY: Orbis Books, 2002).

²¹Wilfred Cantwell Smith, *The Meaning and End of Religion* (Minneapolis: Fortress Press, 1991).

²²Ninian Smart, *The World's Religions*, 2nd ed. (Cambridge: Cambridge University Press, 1998).

normatif terhadap benar atau salahnya suatu keyakinan. Pendekatan semacam ini mendorong munculnya penghargaan yang lebih besar terhadap keberagaman ekspresi keagamaan dan membantu mengurangi kecenderungan untuk melihat agama lain semata-mata dari sudut pandang tradisi sendiri.

Perkembangan tersebut semakin diperkuat oleh berbagai kajian sosiologi agama. José Casanova menunjukkan bahwa modernitas tidak menghasilkan hilangnya agama sebagaimana pernah diperkirakan oleh sebagian teori sekularisasi klasik.²³ Sebaliknya, agama tetap memainkan peran penting dalam ruang publik dan terus hadir dalam berbagai bentuk yang beragam. Situasi ini menyebabkan masyarakat modern harus berhadapan dengan keberagaman agama secara lebih intens daripada sebelumnya.

Di Indonesia, dinamika serupa juga dapat ditemukan dalam berbagai refleksi mengenai keberagaman. Nurcholish Madjid melihat pluralitas sebagai bagian dari kenyataan historis yang harus diterima secara positif. Menurutnya, masyarakat yang sehat tidak dibangun di atas penolakan terhadap perbedaan, melainkan di atas kesediaan untuk mengelola perbedaan tersebut secara konstruktif.²⁴ Sementara itu, Abdurrahman Wahid menekankan pentingnya membangun kehidupan bersama yang menghormati keberagaman budaya dan agama sebagai bagian dari identitas bangsa Indonesia.²⁵

Meskipun demikian, perlu dicatat bahwa pergeseran dari pluralitas menuju pluralisme agama bukanlah proses yang bebas dari persoalan. Ketika pluralisme bergerak dari pengakuan terhadap keberagaman menuju upaya menjelaskan hubungan teologis antaragama, berbagai pertanyaan mendasar mulai muncul. Apakah keberagaman agama hanya menunjukkan variasi ekspresi budaya manusia, ataukah menunjukkan keberadaan jalan-jalan keselamatan yang setara? Apakah perbedaan doktrin yang mendasar dapat dipahami sebagai variasi dari kebenaran yang sama, ataukah perbedaan tersebut justru menunjukkan adanya pertentangan yang tidak dapat direduksi? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang kemudian menjadi pusat perdebatan dalam kajian pluralisme agama modern.

Kritik terhadap Pluralisme Agama dan Problem Relativisme Teologis

Pluralisme agama berkembang sebagai salah satu upaya paling berpengaruh dalam menjawab tantangan keberagaman agama di dunia modern. Di tengah meningkatnya interaksi antarumat beragama, pluralisme menawarkan suatu paradigma yang berusaha mengurangi ketegangan akibat perbedaan keyakinan dengan menekankan bahwa agama-agama besar dunia memiliki nilai yang setara atau setidaknya mengarah kepada tujuan spiritual yang sama. Pendekatan ini memperoleh perhatian yang luas karena dianggap mampu menyediakan landasan filosofis bagi dialog dan kerja sama antaragama. Namun demikian, seiring dengan berkembangnya diskusi akademik mengenai pluralisme agama, muncul pula berbagai kritik yang mempertanyakan validitas filosofis maupun konsekuensi teologis dari pendekatan tersebut.

Salah satu kritik utama terhadap pluralisme agama berkaitan dengan persoalan koherensi logis. Berbagai agama dunia mengajukan klaim-klaim yang dalam banyak hal tidak hanya berbeda, tetapi juga saling bertentangan. Perbedaan tersebut mencakup aspek-aspek yang sangat mendasar, seperti konsep ketuhanan, hakikat manusia, sumber keselamatan, tujuan akhir kehidupan, dan makna realitas itu sendiri. Dalam konteks ini, sejumlah filsuf agama mempertanyakan bagaimana berbagai klaim yang bertentangan

²³José Casanova, *Public Religions in the Modern World* (Chicago: University of Chicago Press, 1994).

²⁴Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban*.

²⁵Wahid, *Islam Kosmopolitan*.

secara substantif dapat dipandang sebagai ekspresi yang sama-sama benar dari realitas yang identik.

Keith Ward, yang dikenal sebagai salah satu filsuf agama yang banyak terlibat dalam dialog lintas agama, mengakui bahwa terdapat unsur-unsur universal dalam pengalaman religius manusia. Akan tetapi, Ward juga menegaskan bahwa agama-agama tidak dapat direduksi begitu saja menjadi variasi-variasi sederhana dari satu pengalaman yang seragam. Setiap tradisi keagamaan berkembang melalui sejarah, simbol, bahasa, dan struktur keyakinan yang unik. Oleh sebab itu, setiap upaya untuk menyatukan seluruh agama ke dalam satu kerangka interpretatif universal harus berhadapan dengan kenyataan bahwa perbedaan-perbedaan mendasar tetap ada dan tidak selalu dapat dijelaskan sebagai variasi yang saling melengkapi.²⁶

Kritik yang lebih tajam muncul dari filsuf agama Alvin Plantinga. Menurut Plantinga, pluralisme agama sering kali mengkritik klaim kebenaran eksklusif yang dimiliki oleh agama-agama tertentu, tetapi pada saat yang sama pluralisme sendiri mengajukan klaim universal mengenai hakikat seluruh agama.²⁷ Dengan demikian, pluralisme tidak benar-benar menghindari eksklusivitas sebagaimana yang sering diklaim. Sebaliknya, pluralisme hanya menggantikan satu bentuk klaim universal dengan bentuk klaim universal yang lain. Jika seorang pluralis menyatakan bahwa seluruh agama pada dasarnya merupakan jalan yang setara menuju realitas ilahi, maka pernyataan tersebut merupakan sebuah keyakinan filosofis yang tidak otomatis diterima oleh seluruh tradisi keagamaan.

Persoalan ini menunjukkan bahwa pluralisme agama menghadapi apa yang sering disebut sebagai paradoks pluralistik. Di satu sisi, pluralisme berusaha menghormati seluruh agama. Namun di sisi lain, pluralisme harus menafsirkan ulang agama-agama tersebut agar sesuai dengan kerangka pluralistik yang dibangunnya. Akibatnya, agama-agama tidak lagi dipahami berdasarkan pengakuan dirinya sendiri, melainkan berdasarkan interpretasi yang diberikan oleh teori pluralisme. Dalam kondisi demikian, pluralisme justru berpotensi menciptakan bentuk dominasi konseptual baru atas agama-agama yang hendak dihormatinya.

Selain problem koherensi logis, kritik terhadap pluralisme agama juga berkaitan dengan persoalan epistemologis. Nicholas Wolterstorff berpendapat bahwa keyakinan keagamaan tidak dapat dilepaskan dari komunitas, tradisi, dan kerangka rasionalitas yang melahirkannya.²⁸ Setiap agama membangun pemahamannya mengenai realitas melalui seperangkat asumsi dasar yang membentuk cara para penganutnya memahami dunia. Karena itu, perbedaan antaragama tidak selalu dapat diselesaikan hanya dengan mengasumsikan adanya realitas universal yang sama di balik seluruh tradisi. Dalam banyak kasus, perbedaan tersebut justru mencerminkan cara pandang yang benar-benar berbeda mengenai hakikat realitas itu sendiri.

Persoalan tersebut mendapat perhatian dari Miroslav Volf dalam refleksinya mengenai identitas, rekonsiliasi, dan kehidupan publik. Volf mengingatkan bahwa penghormatan terhadap pihak lain tidak harus diwujudkan melalui penghilangan identitas yang membedakan satu kelompok dari kelompok lainnya.²⁹ Sebaliknya, relasi yang sehat justru menuntut pengakuan yang jujur terhadap keberadaan perbedaan.

²⁶Keith Ward, *Religion and Revelation: A Theology of Revelation in the World's Religions* (Oxford: Clarendon Press, 1994).

²⁷Alvin Plantinga, *Warranted Christian Belief* (Oxford: Oxford University Press, 2000).

²⁸Nicholas Wolterstorff, *John Locke and the Ethics of Belief* (Cambridge: Cambridge University Press, 1996).

²⁹Volf, *A Public Faith*.

Menurutnya, keterbukaan terhadap pihak lain tidak identik dengan pelepasan keyakinan yang dimiliki sendiri. Jika penghormatan terhadap keberagaman hanya dapat dicapai melalui pengaburan identitas, maka pada akhirnya tidak ada lagi keberagaman yang benar-benar tersisa untuk dihormati.

Dalam konteks yang serupa, Jürgen Habermas mengemukakan bahwa masyarakat plural modern membutuhkan ruang publik yang memungkinkan berbagai pandangan dunia berpartisipasi secara setara tanpa harus dipaksa meninggalkan identitas dasarnya.³⁰ Pandangan ini menunjukkan bahwa kehidupan bersama dalam masyarakat plural tidak mensyaratkan keseragaman keyakinan. Yang diperlukan adalah kesediaan untuk hidup bersama dalam perbedaan sambil tetap mengakui hak setiap komunitas untuk mempertahankan keyakinan yang menjadi identitasnya.

Kritik terhadap pluralisme agama juga muncul dari perspektif hermeneutika. Paul Ricoeur menunjukkan bahwa setiap tradisi religius memiliki simbol, narasi, dan bahasa yang membentuk cara para penganutnya memahami realitas.³¹ Oleh karena itu, makna keagamaan tidak dapat begitu saja dipisahkan dari konteks interpretatif yang melahirkannya. Ketika berbagai tradisi keagamaan dipaksa masuk ke dalam satu kategori universal yang sama, terdapat risiko bahwa kekayaan makna yang terkandung dalam masing-masing tradisi akan hilang.

Dari berbagai kritik tersebut terlihat bahwa persoalan utama pluralisme agama bukanlah keinginannya untuk mendorong perdamaian dan dialog, melainkan asumsi filosofis yang digunakan untuk menjelaskan hubungan antaragama. Keberagaman agama memang merupakan fakta yang tidak dapat disangkal, dan dialog antaragama merupakan kebutuhan yang semakin penting dalam dunia modern. Akan tetapi, pengakuan terhadap keberagaman tidak secara otomatis mengharuskan seseorang menerima bahwa seluruh agama mengajarkan hal yang sama atau memiliki validitas teologis yang identik.

Toleransi dan Sinkretisme: Menentukan Batas yang Sehat

Setelah menelaah pluralisme sosial sebagai fondasi kehidupan bersama dan mengkaji berbagai kritik terhadap pluralisme agama, pembahasan selanjutnya perlu diarahkan kepada relasi antara toleransi dan sinkretisme. Kedua konsep ini sering kali muncul dalam diskusi mengenai keberagaman agama, tetapi tidak jarang dipahami secara kurang tepat. Dalam sebagian percakapan publik, toleransi dianggap menuntut penerimaan terhadap seluruh keyakinan yang berbeda, bahkan hingga pada tingkat pencampuran unsur-unsur kepercayaan yang berasal dari berbagai tradisi agama. Sebaliknya, pihak lain melihat setiap bentuk keterbukaan terhadap agama lain sebagai ancaman terhadap kemurnian iman. Kedua kecenderungan tersebut menunjukkan perlunya penjelasan yang lebih cermat mengenai batas-batas yang membedakan toleransi dari sinkretisme.

Secara umum, toleransi dapat dipahami sebagai kesediaan untuk menghormati keberadaan, hak, dan kebebasan pihak lain yang memiliki keyakinan berbeda tanpa harus menyetujui atau mengadopsi keyakinan tersebut. Dalam pengertian ini, toleransi tidak berangkat dari asumsi bahwa seluruh pandangan adalah benar, melainkan dari pengakuan bahwa setiap manusia memiliki martabat dan hak untuk memegang keyakinannya sendiri. Oleh karena itu, toleransi lebih berkaitan dengan relasi antarpribadi dan kehidupan sosial daripada dengan penyeragaman keyakinan.

³⁰Jürgen Habermas, *Between Naturalism and Religion: Philosophical Essays* (Cambridge: Polity Press, 2008).

³¹Paul Ricoeur, *Interpretation Theory: Discourse and the Surplus of Meaning* (Fort Worth: Texas Christian University Press, 1976).

Pandangan tersebut sejalan dengan pemikiran John Locke yang dalam karyanya mengenai toleransi menegaskan bahwa pemaksaan keyakinan tidak pernah dapat menghasilkan iman yang sejati. Menurut Locke, negara maupun kelompok sosial tidak memiliki legitimasi untuk memaksa seseorang menerima suatu keyakinan tertentu karena keyakinan keagamaan pada hakikatnya berkaitan dengan hati nurani individu.³² Meskipun konteks pemikiran Locke berbeda dengan masyarakat kontemporer, gagasannya memberikan landasan penting bagi perkembangan konsep toleransi modern yang menempatkan kebebasan beragama sebagai hak fundamental manusia.

Dalam perkembangan berikutnya, toleransi tidak lagi dipahami sekadar sebagai sikap menahan diri dari tindakan represif terhadap pihak yang berbeda, melainkan sebagai upaya aktif untuk membangun kehidupan bersama yang damai. Michael Walzer menjelaskan bahwa masyarakat plural membutuhkan bentuk toleransi yang memungkinkan kelompok-kelompok berbeda hidup berdampingan tanpa harus kehilangan identitas masing-masing.³³ Menurutnya, toleransi justru memperoleh makna ketika perbedaan itu tetap ada. Jika seluruh perbedaan dihapus atau dilebur menjadi satu, maka toleransi kehilangan objeknya karena tidak ada lagi keberagaman yang perlu dihormati.

Pemahaman ini penting karena dalam beberapa konteks, toleransi sering kali digeser ke arah yang lebih jauh sehingga menyerupai sinkretisme. Secara etimologis, istilah sinkretisme berasal dari kata Yunani *synkretismos* yang merujuk pada proses penyatuan unsur-unsur yang berbeda. Dalam studi agama, sinkretisme umumnya digunakan untuk menggambarkan pencampuran elemen-elemen dari dua atau lebih tradisi keagamaan sehingga menghasilkan sistem keyakinan baru yang berbeda dari bentuk asalnya. Fenomena sinkretisme dapat ditemukan dalam berbagai periode sejarah dan muncul dalam bentuk yang sangat beragam, mulai dari perpaduan ritus keagamaan hingga penggabungan konsep-konsep teologis yang berasal dari tradisi yang berbeda.³⁴

Dari perspektif sejarah agama-agama, sinkretisme sering kali muncul dalam situasi perjumpaan budaya yang intens. Pada masa Helenistik misalnya, interaksi antara berbagai bangsa dan sistem kepercayaan menghasilkan beragam bentuk perpaduan religius yang memadukan unsur-unsur Yunani, Mesir, Persia, dan tradisi-tradisi lokal lainnya. Fenomena serupa juga dapat ditemukan dalam berbagai wilayah yang mengalami kolonisasi, migrasi besar-besaran, atau kontak budaya yang berlangsung dalam waktu lama. Dalam konteks tersebut, sinkretisme sering dipandang sebagai mekanisme adaptasi sosial dan budaya yang memungkinkan kelompok-kelompok berbeda membangun identitas baru yang lebih inklusif.³⁵

Pada titik inilah perbedaan mendasar antara toleransi dan sinkretisme menjadi terlihat. Toleransi memungkinkan seseorang untuk menghormati keberadaan keyakinan lain tanpa harus mengubah keyakinannya sendiri. Sinkretisme, sebaliknya, bergerak melampaui penghormatan terhadap perbedaan menuju proses pencampuran unsur-unsur keyakinan yang berbeda. Dengan kata lain, toleransi mempertahankan keberadaan batas-batas identitas, sedangkan sinkretisme cenderung mengaburkan batas-batas tersebut.

³²John Locke, *A Letter Concerning Toleration*, ed. J. H. Tully (Indianapolis: Hackett Publishing, 1983 [1689]).

³³Michael Walzer, *On Toleration* (New Haven: Yale University Press, 1997).

³⁴Charles Stewart and Rosalind Shaw, eds., *Syncretism/Anti-Syncretism: The Politics of Religious Synthesis* (London: Routledge, 1994).

³⁵André Droogers, "Syncretism: The Problem of Definition, the Definition of the Problem," in *Dialogue and Syncretism: An Interdisciplinary Approach* (1989), 7–25.

Pemikiran ini memperoleh dukungan dari kajian identitas sosial dan budaya. Charles Taylor menekankan bahwa pengakuan (*recognition*) terhadap identitas merupakan kebutuhan yang mendasar dalam kehidupan manusia.³⁶ Menurut Taylor, penghormatan terhadap pihak lain tidak berarti meniadakan perbedaan yang membentuk identitas mereka, tetapi justru mengakui keberadaan perbedaan tersebut sebagai sesuatu yang sah. Dalam konteks keagamaan, penghormatan terhadap agama lain tidak harus diwujudkan melalui pencampuran doktrin atau ritual, melainkan melalui pengakuan bahwa setiap komunitas memiliki hak untuk mempertahankan tradisi yang dianggap penting bagi identitasnya.

Dengan demikian, toleransi dan sinkretisme merupakan dua konsep yang berbeda meskipun keduanya sama-sama muncul dalam konteks masyarakat plural. Toleransi berupaya menjaga kehidupan bersama melalui penghormatan terhadap perbedaan, sedangkan sinkretisme bergerak menuju pencampuran identitas dan keyakinan yang berbeda. Oleh sebab itu, toleransi tidak seharusnya dipahami sebagai jalan menuju sinkretisme. Justru toleransi yang sehat hanya dapat berkembang apabila setiap pihak memiliki kebebasan untuk mempertahankan identitas dan keyakinannya tanpa harus dipaksa untuk meleburkannya ke dalam sistem keyakinan yang lebih luas.

Menjaga Identitas tanpa Menumbuhkan Intoleransi

Salah satu tantangan terbesar dalam masyarakat majemuk bukan hanya bagaimana menghargai keberagaman, tetapi juga bagaimana mempertahankan identitas keagamaan tanpa menjadikannya sebagai sumber permusuhan terhadap pihak lain. Dalam banyak kasus, ketegangan antaragama tidak muncul karena keberagaman itu sendiri, melainkan karena cara keberagaman tersebut dipahami dan dijalani oleh para pemeluk agama. Di satu sisi, terdapat kecenderungan untuk menghilangkan perbedaan demi mencapai persatuan, yang pada akhirnya dapat mengarah pada sinkretisme. Di sisi lain, terdapat kecenderungan untuk mempertahankan identitas keagamaan secara sedemikian eksklusif sehingga memunculkan sikap intoleran terhadap pihak yang berbeda.

Sebagian besar agama memiliki keyakinan yang bersifat eksklusif mengenai hakikat Tuhan, keselamatan, kebenaran, dan tujuan hidup manusia. Keyakinan tersebut bukanlah sesuatu yang muncul secara kebetulan, melainkan merupakan bagian dari identitas yang membentuk keberadaan masing-masing tradisi keagamaan. Dalam agama Kristen, misalnya, pengakuan terhadap keunikan Kristus merupakan bagian integral dari iman Kristen. Demikian pula agama-agama lain memiliki keyakinan khas yang menjadi fondasi teologis dan spiritual komunitasnya. Karena itu, keberadaan klaim-klaim eksklusif tidak dapat secara otomatis dipandang sebagai masalah.

Persoalan muncul ketika keyakinan yang bersifat internal tersebut berubah menjadi dasar untuk memandang kelompok lain secara negatif atau bahkan menolak hak keberadaan mereka dalam ruang sosial yang sama. Dalam situasi demikian, identitas keagamaan tidak lagi berfungsi sebagai sumber makna dan orientasi hidup, melainkan sebagai instrumen untuk membangun batas yang kaku antara “kami” dan “mereka”. Akibatnya, kehidupan bersama yang seharusnya dibangun di atas penghormatan terhadap martabat manusia berubah menjadi arena kompetisi identitas yang sarat dengan prasangka dan kecurigaan.

Pemikiran Martin Buber memberikan perspektif yang menarik. Menurut Buber, hubungan yang sehat antar manusia hanya mungkin terjadi ketika pihak lain

³⁶Charles Taylor, “The Politics of Recognition,” in *Multiculturalism: Examining the Politics of Recognition*, ed. Amy Gutmann (Princeton: Princeton University Press, 1994), 25–73.

diperlakukan sebagai pribadi yang memiliki martabat, bukan sebagai objek yang harus dikalahkan atau dimanipulasi.³⁷ Prinsip tersebut memiliki relevansi yang besar dalam relasi antaragama. Ketika pemeluk agama lain hanya dipandang sebagai objek perdebatan atau sasaran kemenangan ideologis, maka hubungan yang otentik menjadi sulit terwujud. Sebaliknya, ketika mereka dipandang sebagai sesama manusia yang memiliki martabat dan hak untuk memegang keyakinannya, ruang dialog yang lebih sehat dapat terbentuk.

Dalam konteks kekristenan, persoalan ini juga berkaitan dengan pemahaman mengenai apologetika. Secara historis, apologetika berkembang sebagai upaya memberikan pertanggungjawaban rasional terhadap iman yang diyakini. Dasar biblika yang sering dikaitkan dengan apologetika terdapat dalam 1 Petrus 3:15 yang mendorong orang percaya untuk selalu siap memberikan alasan mengenai pengharapan yang ada di dalam dirinya, namun dengan lemah lembut dan hormat. Dengan demikian, tujuan utama apologetika bukanlah mendiskreditkan agama lain, melainkan menjelaskan dan mempertanggungjawabkan iman yang diyakini secara jujur dan bertanggung jawab.

Pemahaman ini ditegaskan oleh Alister McGrath yang menjelaskan bahwa apologetika pada dasarnya merupakan upaya menjelaskan mengapa suatu keyakinan dianggap masuk akal dan layak dipercaya, bukan sekadar memenangkan perdebatan atau mempermalukan pihak lain.³⁸ Ketika apologetika direduksi menjadi sarana menyerang keyakinan orang lain, maka esensi apologetika itu sendiri telah mengalami distorsi. Apologetika yang sehat tetap mempertahankan keyakinan yang kuat terhadap kebenaran iman yang dianut, tetapi pada saat yang sama mengakui bahwa dialog harus dilakukan dengan penghormatan terhadap martabat dan kebebasan pihak lain.

Pemikiran Miroslav Volf dapat membantu menjelaskan keseimbangan tersebut. Volf berpendapat bahwa penerimaan terhadap pihak lain tidak berarti menghapus perbedaan yang ada, melainkan membuka ruang bagi keberadaan pihak lain tanpa kehilangan identitas diri sendiri.³⁹ Dalam perspektif ini, penghormatan terhadap pihak lain tidak dibangun melalui relativisme, tetapi melalui kesediaan untuk hidup berdampingan dengan mereka yang berbeda. Identitas tetap dipertahankan, tetapi identitas tersebut tidak digunakan sebagai dasar untuk menolak keberadaan pihak lain.

Pada titik inilah masyarakat plural yang sehat menemukan bentuknya. Masyarakat yang sehat bukanlah masyarakat yang menghapus seluruh perbedaan demi keseragaman, tetapi juga bukan masyarakat yang membiarkan identitas berubah menjadi alat permusuhan. Sebaliknya, masyarakat majemuk yang sehat adalah masyarakat yang mampu menumbuhkan toleransi tanpa kehilangan identitas dan mempertahankan identitas tanpa menumbuhkan intoleransi.

Coexistence without Relativism: Sebuah Sintesis

Pembahasan pada bagian-bagian sebelumnya menunjukkan bahwa pluralisme merupakan konsep yang memiliki dimensi yang kompleks dan tidak dapat dipahami secara sederhana. Di satu sisi, pluralisme sosial terbukti memiliki kontribusi yang signifikan bagi kehidupan masyarakat majemuk karena memungkinkan berbagai kelompok yang berbeda untuk hidup berdampingan secara damai dalam ruang sosial yang sama. Di sisi lain, pluralisme agama dalam bentuk tertentu menimbulkan berbagai

³⁷Martin Buber, *I and Thou*, trans. Walter Kaufmann (New York: Touchstone Publisher, 1971).

³⁸Alister E. McGrath, *Mere Apologetics: How to Help Seekers and Skeptics Find Faith* (Grand Rapids: Baker Books, 2012).

³⁹Miroslav Volf, *Exclusion and Embrace: A Theological Exploration of Identity, Otherness, and Reconciliation* (Nashville: Abingdon Press, 1996).

pertanyaan filosofis dan teologis, terutama ketika berkembang menjadi relativisme yang mengaburkan perbedaan-perbedaan mendasar antaragama.

Dalam konteks inilah konsep *coexistence without relativism* diajukan sebagai sintesis dari keseluruhan pembahasan artikel ini. *Coexistence without relativism* berangkat dari pengakuan bahwa masyarakat plural tidak dapat dibangun melalui penyeragaman keyakinan, tetapi juga tidak dapat dipertahankan melalui permusuhan yang lahir dari perbedaan keyakinan. Kehidupan bersama yang sehat hanya mungkin terwujud ketika setiap komunitas memiliki kebebasan untuk mempertahankan identitas dan keyakinannya, sambil pada saat yang sama menghormati hak komunitas lain untuk melakukan hal yang sama.

Pendekatan ini pertama-tama mengakui bahwa perbedaan antaragama adalah nyata. Berbagai agama tidak hanya berbeda dalam aspek ritual atau tradisi budaya, tetapi juga berbeda dalam memahami Tuhan, manusia, keselamatan, kehidupan setelah kematian, dan tujuan akhir eksistensi manusia. Sebagaimana dikemukakan oleh Hans-Georg Gadamer, pemahaman yang sejati tidak lahir dari penghapusan perbedaan, melainkan dari perjumpaan antara horizon-horizon yang berbeda yang kemudian membuka ruang bagi pengertian yang lebih mendalam.⁴⁰

Pengakuan terhadap perbedaan tersebut sekaligus membedakan *coexistence without relativism* dari pluralisme agama yang mengarah pada penyamaan seluruh agama. Dalam kerangka ini, seseorang tidak dituntut untuk menganggap seluruh agama mengajarkan hal yang sama atau memiliki validitas teologis yang identik. Sebaliknya, setiap individu maupun komunitas tetap bebas meyakini kebenaran keyakinannya masing-masing. Akan tetapi, keyakinan tersebut tidak digunakan sebagai dasar untuk meniadakan hak pihak lain untuk memegang keyakinan yang berbeda. Dengan demikian, penghormatan terhadap kebebasan beragama tidak dibangun di atas relativisasi kebenaran, melainkan di atas penghormatan terhadap martabat manusia.

Pemikiran ini memiliki kedekatan dengan gagasan yang dikembangkan oleh Nicholas Wolterstorff mengenai kehidupan publik yang plural. Wolterstorff menolak pandangan bahwa individu harus meninggalkan keyakinan agamanya ketika memasuki ruang publik.⁴¹ Menurutnya, masyarakat demokratis justru harus memberikan ruang bagi berbagai pandangan dunia untuk berpartisipasi secara terbuka dalam kehidupan bersama. Namun partisipasi tersebut harus dilakukan dengan kesadaran bahwa masyarakat terdiri atas berbagai kelompok yang memiliki keyakinan yang berbeda.

Coexistence without relativism juga menolak kecenderungan untuk mengubah identitas keagamaan menjadi alat dominasi terhadap pihak lain. Jonathan Sacks berargumen bahwa keberagaman bukanlah kesalahan dalam rancangan kemanusiaan, melainkan bagian dari kenyataan yang memungkinkan manusia belajar hidup bersama dalam perbedaan.⁴² Menurutnya, masyarakat yang sehat bukanlah masyarakat yang terdiri atas orang-orang yang berpikir sama, melainkan masyarakat yang mampu hidup bersama meskipun memiliki keyakinan yang berbeda.

Prinsip tersebut sangat relevan dalam konteks Indonesia. Sebagai bangsa yang dibangun di atas realitas kemajemukan, Indonesia sejak awal tidak pernah mengharuskan seluruh warga negara memiliki keyakinan yang sama. Sebaliknya, kehidupan kebangsaan Indonesia bertumpu pada kesediaan berbagai kelompok untuk

⁴⁰Hans-Georg Gadamer, *Truth and Method* (New York: Continuum, 2004).

⁴¹Nicholas Wolterstorff, *The Mighty and the Almighty: An Essay in Political Theology* (Cambridge: Cambridge University Press, 2012).

⁴²Jonathan Sacks, *The Dignity of Difference: How to Avoid the Clash of Civilizations* (London: Continuum, 2002).

hidup bersama dalam satu ikatan nasional tanpa harus kehilangan identitas masing-masing. Semangat ini tercermin dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang menegaskan bahwa persatuan tidak dibangun melalui penghapusan keberagaman, melainkan melalui penghormatan terhadap keberagaman tersebut.

Berdasarkan keseluruhan pembahasan, dapat dirumuskan bahwa *coexistence without relativism* bertumpu pada empat prinsip utama. Pertama, pengakuan terhadap realitas perbedaan yang memang ada di antara agama-agama. Kedua, penghormatan terhadap martabat manusia dan kebebasan beragama tanpa memandang perbedaan keyakinan. Ketiga, pemeliharaan identitas keagamaan tanpa jatuh ke dalam eksklusivisme sosial yang memusuhi pihak lain. Keempat, pengembangan dialog dan kerja sama sosial tanpa tuntutan untuk menghapus atau meleburkan perbedaan teologis yang ada. Keempat prinsip tersebut memungkinkan keberagaman dan identitas berjalan secara bersamaan tanpa harus saling meniadakan.

Kesimpulan

Artikel ini menunjukkan bahwa pluralisme merupakan konsep yang memiliki makna yang beragam dan karena itu tidak dapat dipahami secara seragam dalam seluruh konteks kehidupan manusia. Dalam ranah sosial, pluralisme merupakan suatu kebutuhan yang tidak dapat dihindari dalam masyarakat majemuk. Keberagaman agama, budaya, etnis, dan pandangan hidup merupakan realitas yang harus diterima dan dikelola secara konstruktif. Dalam pengertian ini, pluralisme sosial memberikan fondasi yang penting bagi terciptanya kehidupan bersama yang damai, penghormatan terhadap martabat manusia, serta kerja sama lintas identitas dalam ruang publik.

Namun demikian, ketika pluralisme berkembang ke dalam ranah teologis sebagai upaya untuk menjelaskan hubungan antaragama, muncul berbagai persoalan konseptual yang tidak dapat diabaikan. Pluralisme agama yang mengarah pada relativisasi klaim-klaim kebenaran berpotensi mengaburkan perbedaan-perbedaan mendasar yang justru membentuk identitas masing-masing tradisi keagamaan. Pada titik tertentu, upaya mengurangi perbedaan demi mencapai kesatuan dapat bergeser menuju sinkretisme yang menghilangkan kekhasan agama-agama itu sendiri.

Di sisi lain, artikel ini juga menunjukkan bahwa pemeliharaan identitas keagamaan tidak boleh berkembang menjadi intoleransi. Keyakinan yang kuat terhadap ajaran agama masing-masing merupakan bagian yang sah dari kebebasan beragama, tetapi keyakinan tersebut tidak boleh dijadikan dasar untuk merendahkan, memusuhi, atau meniadakan hak kelompok lain yang memiliki keyakinan berbeda. Oleh karena itu, masyarakat plural yang sehat harus mampu memelihara keseimbangan antara komitmen terhadap identitas sendiri dan penghormatan terhadap identitas pihak lain.

Berdasarkan temuan tersebut, artikel ini mengusulkan konsep *coexistence without relativism* sebagai kerangka yang memungkinkan kehidupan bersama dalam masyarakat majemuk. *Coexistence without relativism* mengakui realitas perbedaan antaragama, menghormati kebebasan setiap komunitas untuk mempertahankan identitas dan keyakinannya, serta mendorong dialog dan kerja sama sosial tanpa tuntutan untuk menyeragamkan atau meleburkan perbedaan yang ada. Dengan demikian, masyarakat yang harmonis tidak dibangun melalui relativisme yang menghapus identitas, tetapi juga tidak dibangun melalui intoleransi yang memusuhi perbedaan. Sebaliknya, kehidupan bersama yang sehat hanya dapat terwujud ketika toleransi tidak berubah menjadi sinkretisme dan identitas tidak berubah menjadi intoleransi.

Referens/Rujukan

- Berger, Peter L. *The Many Altars of Modernity: Toward a Paradigm for Religion in a Pluralist Age*. Berlin: De Gruyter, 2014.
- Buber, Martin. *I and Thou*. Translated by Walter Kaufmann. New York: Touchstone Publisher, 1971.
- Casanova, José. *Public Religions in the Modern World*. Chicago: University of Chicago Press, 1994.
- Creswell, John W., and Cheryl N. Poth. *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing among Five Approaches*. 4th ed. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2017.
- D'Costa, Gavin. *Christianity and World Religions: Disputed Questions in the Theology of Religions*. Chichester: Wiley-Blackwell, 2009.
- Droogers, André. "Syncretism: The Problem of Definition, the Definition of the Problem." In *Dialogue and Syncretism: An Interdisciplinary Approach*, 7–25. 1989.
- Dupuis, Jacques. *Toward a Christian Theology of Religious Pluralism*. Maryknoll, NY: Orbis Books, 2002.
- Eck, Diana L. *A New Religious America: How a "Christian Country" Has Become the World's Most Religiously Diverse Nation*. San Francisco: HarperSanFrancisco, 2002.
- Gadamer, Hans-Georg. *Truth and Method*. New York: Continuum, 2004.
- Habermas, Jürgen. *Between Naturalism and Religion: Philosophical Essays*. Cambridge: Polity Press, 2008.
- Hick, John. *An Interpretation of Religion: Human Responses to the Transcendent*. 2nd ed. New Haven: Yale University Press, 2004.
- Knitter, Paul F. *Introducing Theologies of Religions*. Maryknoll, NY: Orbis Books, 2002.
- Kraemer, Hendrik. *The Christian Message in a Non-Christian World*. London: Edinburgh House Press, 1938.
- Locke, John. *A Letter Concerning Toleration*. Edited by J. H. Tully. Indianapolis: Hackett Publishing, 1983. First published 1689.
- Luckmann, Thomas. *The Invisible Religion: The Problem of Religion in Modern Society*. New York: Macmillan, 1967.
- Madjid, Nurcholish. *Islam Doktrin dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemodernan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2019.
- Magnis-Suseno, Franz. *Menalar Tuhan*. Yogyakarta: Kanisius, 2006.
- McGrath, Alister E. *Mere Apologetics: How to Help Seekers and Skeptics Find Faith*. Grand Rapids: Baker Books, 2012.
- Netland, Harold A. *Encountering Religious Pluralism: The Challenge to Christian Faith and Mission*. Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 2001.
- Newbigin, Lesslie. *The Gospel in a Pluralist Society*. Grand Rapids: William B. Eerdmans Publishing, 1989.
- Parekh, Bhikhu. *Rethinking Multiculturalism: Cultural Diversity and Political Theory*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2000.
- Plantinga, Alvin. *Warranted Christian Belief*. Oxford: Oxford University Press, 2000.
- Race, Alan. *Christians and Religious Pluralism: Patterns in the Christian Theology of Religions*. London: SCM Press, 1983.
- Rawls, John. *Political Liberalism*. New York: Columbia University Press, 2015.
- Ricoeur, Paul. *Interpretation Theory: Discourse and the Surplus of Meaning*. Fort Worth: Texas Christian University Press, 1976.
- Sacks, Jonathan. *The Dignity of Difference: How to Avoid the Clash of Civilizations*. London: Continuum, 2002.

- Smart, Ninian. *The World's Religions*. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 1998.
- Smith, Wilfred Cantwell. *The Meaning and End of Religion*. Minneapolis: Fortress Press, 1991.
- Stewart, Charles, and Rosalind Shaw, eds. *Syncretism/Anti-Syncretism: The Politics of Religious Synthesis*. London: Routledge, 1994.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. 2nd ed. Bandung: Alfabeta, 2019.
- Taylor, Charles. "The Politics of Recognition." In *Multiculturalism: Examining the Politics of Recognition*, edited by Amy Gutmann, 25–73. Princeton: Princeton University Press, 1994.
- Volf, Miroslav. *Exclusion and Embrace: A Theological Exploration of Identity, Otherness, and Reconciliation*. Nashville: Abingdon Press, 1996.
- Volf, Miroslav. *A Public Faith: How Followers of Christ Should Serve the Common Good*. Grand Rapids: Brazos Press, 2011.
- Wahid, Abdurrahman. *Islam Kosmopolitan: Nilai-nilai Indonesia dan Transformasi Kebudayaan*. Jakarta: The Wahid Institute, 2007.
- Walzer, Michael. *On Toleration*. New Haven: Yale University Press, 1997.
- Ward, Keith. *Religion and Revelation: A Theology of Revelation in the World's Religions*. Oxford: Clarendon Press, 1994.
- Wolterstorff, Nicholas. *John Locke and the Ethics of Belief*. Cambridge: Cambridge University Press, 1996.
- Wolterstorff, Nicholas. *The Mighty and the Almighty: An Essay in Political Theology*. Cambridge: Cambridge University Press, 2012.
- Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. 3rd ed. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2014.